

ALASAN YORDANIA MEMUTUSKAN PERJANJIAN DAMAI DENGAN ISRAEL

(1994-2019)

Jordan Reasons to Canceling The Peace Treaty with Israel (1994-2019)

Rizky Pascawati Muslim

ABSTRAK

Karya tulis ini berusaha untuk menjelaskan alasan Pemerintah Yordania memutuskan perjanjian damai dengan Israel. Perjanjian damai yang ditandatangani pada tahun 1994 telah mengawali adanya hubungan bilateral antara Yordania-Israel diberbagai bidang kerjasama. Namun pada 2018 lalu, Raja Yordania yaitu Raja Abdullah II, menyatakan membatalkan perjanjian yang telah berlangsung selama 25 tahun tersebut. Tulisan ini akan menggunakan teori Foreign Decision Making Process oleh William D. Coplin. Yordania memutuskan perjanjian damai yang pertama karena konteks internasional yaitu adanya pengakuan sepihak Israel terhadap kepemilikan area Yerusalem. Yang kedua, krisis ekonomi di Yordania yang menjadi semakin buruk dan kapabilitas militernya terutama di perbatasan semakin melemah sejak adanya pengakuan Israel tersebut. Permasalahan ini menyebabkan alasan ketiga yaitu muncul protes dan tuntutan dari rakyat serta partelem Yordania untuk segera memutuskan perjanjian dengan Israel.

Kata Kunci : Yordania, Israel, Perjanjian Damai.

ABSTRACT

This thesis aimed to explain the reasons for Jordan Government canceling the peace treaty with Israel. The peace treaty has initiated bilateral relations between Jordan and Israel in various fields of cooperation. But in 2018, The King of Jordan, King Abdullah II, Declared

that he had canceled this 25-years agreement. This study used the theory of Foreign Decision Making Process by William D. Coplin. The first reason Jordan cancels the peace treaty is because the international context that is Israel's unilateral recognition of Jerusalem's ownership. Second, the economic crisis in Jordan is worsened and its military capabilities, especially at the borders, are weakened since Israel recognition. This Problem led to the third reason that is protest and demands from people and parliament of Jordan to cancel the peace treaty with Israel.

Keywords : Jordan, Israel, Peace Treaty

PENDAHULUAN

Konflik antar Negara-negara Arab dengan Israel memiliki sejarah yang sangat panjang. Secara historis, konflik antara Israel dengan negara-negara Arab menjadi isu yang dinamis, karena banyaknya kepentingan dari aktor-aktor yang terlibat didalamnya. Salah satu aktor yang terlibat adalah Yordania atau *The Hashemite Kingdom of Jordan*. Yordania dan Israel merupakan negara-negara bertetangga yang hanya dipisahkan oleh Sungai Yordania di daerah timur tengah. Dimana Yordania terletak dibagian timur Sungai Yordania, sedangkan Israel di bagian barat Sungai Yordania dan berbagi wilayah dengan Palestina di tepi barat sungai.

Meski lokasi negaranya yang berdekatan, hubungan antar kedua negara tidaklah selalu harmonis. Banyak terjadi dinamika dalam hubungannya, seperti pada saat pecahnya perang arab I dan II.

Dilihat dari hubungan keduanya yang tidak berjalan baik, bahkan bermusuhan, Israel dan Yordania nampak akan sulit untuk mencapai hubungan yang harmonis dan damai. Apalagi selama beberapa dekade sebelumnya, hubungan keduanya hanya diliputi oleh peperangan dan ketidakpercayaan (Safitri, 2017).

Namun ternyata peristiwa mengejutkan terjadi saat kedua negara setuju untuk menandatangani perjanjian perdamaian yang dikenal sebagai "*Treaty*

of Peace Between the State of Israel and the Hashemite Kingdom of Jordan".

Perjanjian di tandatangi pada 26 Oktober 1994 oleh Raja Yordania saat itu yaitu Raja Hussein bersama Perdana Menteri Yitzak Rabin sebagai perwakilan Israel dan Presiden Amerika Serikan, Bill Clinton sebagai mediator (Haberman, 1994).

Dalam perjanjian berisikan tentang penyelesaian sengketa tanah dan air yang berlangsung lama antar keduanya, pengakuan terhadap peran Yordania dalam melindungi tempat-tempat suci di area Yerusalem dan kesepakatan Israel mengakui Negara Palestina di beberapa wilayah di tepi barat Sungai Yordania. Dengan perjanjian tersebut juga, membuka kerjasama diantara kedua negara diberbagai bidang seperti perdagangan hingga pariwisata (Schenker, 2014).

Setelah pendaratan perjanjian damai 1994, kerjasama antara Yordania dan Israel menjadi terbuka dan berkembang di berbagai bidang

menjadikan Yordania sebagai partner penting Israel dan Israel sebagai aset penting Yordania. Kerjasama kedua negara pun telah memberikan keuntungan terhadap Yordania. Meskipun kerjasama antar kedua negara sudah berlangsung lumayan lama, pernyataan mengejutkan datang dari pemerintah Yordania yang pada 2018 lalu menyatakan akan mengakhiri sebagian dari perjanjian damai 1994 tersebut.

Perjanjian damai tersebut merupakan tonggak awal dari tujuan menjalin hubungan yang harmonis antara Yordania dan Israel, juga sebagai pembuka jalan kerjasama antar kedua negara dimana juga berperan menjaga keharmonisan sebagai negara bertetangga serta meningkatkan perekonomian.

Berdasarkan penjelasan tersebut, tulisan ini menarik untuk dikaji untuk melihat alasan Yordania dibalik keputusannya membatalkan perjanjian damai dengan Israel yang telah berlangsung lama tersebut.

KERANGKA PEMIKIRAN

Kebijakan Luar negeri merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh satu negara untuk berinteraksi dengan lingkungan internasional dan negara lain guna mencapai kepentingan nasionalnya.

Menurut William D.Coplin dalam bukunya mengatakan untuk mengetahui perilaku dari suatu negara, kita harus terlebih dahulu mengetahui mengapa pemimpin negara tersebut membuat keputusan. Hal ini dikarenakan setiap tindakan kebijakan luar negeri dapat dilihat sebagai hasil dari dewan pertimbangan yang mempengaruhi negara pembuat kebijakan luar negeri, dalam hal ini dibagi menjadi yaitu (Coplin, 1992) :

A. Situasi Politik Domestik

Suatu sistem politik atau stabilitas dalam negeri dapat membentuk aspek-aspek politik luar negeri. Sehingga keadaan politik dalam negeri dapat berpengaruh dalam pembuatan kebijakan luar negeri sebagai tanggapan dari suatu situasi tertentu. Dalam pengambilan

kebijakan di Yordania, keputusan banyak dipengaruhi oleh aktor-aktor tertentu yang disebut "*Policy Influencer*".

Dalam bukunya, William D.Coplin menjelaskan terdapat 4 jenis *policy influencer* yang mempengaruhi pengambilan keputusan negara, yaitu :

a. Bureaucratic Influencer

Merupakan individu maupun organisasi dalam lembaga pemerintah yang membantu pengambil keputusan dalam menyusun dan menjalankan kebijakan luar negeri. Dalam sistem pemerintahan Yordania memiliki Majelis Nasional atau yang disebut dengan parlemen, terdiri atas majelis tinggi (Senat, atau *House of Notables*) yang ditunjuk oleh Raja dan majelis rendah terpilih (Dewan Perwakilan Rakyat, atau Kamar Deputi). Parlemen ini berfungsi sebagai perwakilan dalam

pencapaian kepentingan rakyat dan sebagai pembuat keputusan untuk memenuhi kepentingan rakyat Yordania (Fanack, 2009).

b. *Partisan Influencer*

Sebagai kelompok yang bertujuan menyampaikan tuntutan-tuntutan masyarakat terkait kebijakan pemerintah. Partai Politik dalam sistem demokrasi merupakan salah satu contoh dari jenis kelompok ini. Biasanya mereka berupaya mempengaruhi kebijakan tertentu dengan cara menekan para pembuat kebijakan tersebut.

Yordania merupakan negara multi-partai yang partai terdaftarnya terdapat sekitar 30 partai-partai kecil yang memiliki perbedaan ideologis antara partai nasionalis dan partai kiri. Namun satu-satunya

partai yang terorganisir dan efektif dengan ideologi yang jelas dan pengikut nasional adalah Front Aksi Islam (IAF) (Nations Encyclopedia, 1997).

c. *Interest Influencer*

Yaitu gabungan kelompok individu yang memiliki kepentingan yang sama. *Interest influencer* biasanya melakukan kampanye dengan menulis surat yang diarahkan kepada para pengambil keputusan. Dalam kasus ini, *Interest Influencer* dapat diartikan sebagai masyarakat Yordania itu sendiri. Dilihat dari peran masyarakat terhadap isu ini.

d. *Mass Influencer*

Yakni kumpulan opini publik yang dibentuk oleh media massa yang nantinya akan menjadi pertimbangan

pengambil keputusan dalam membuat kebijakan luar negeri.

B. Kapabilitas Ekonomi&Militer

Suatu negara haruslah memiliki kemampuan dan kesediaan untuk menciptakan kemampuan yang dibutuhkan untuk menopang politik luar negerinya. Termasuk faktor geografis yang selalu mendasari pertimbangan keamanan dan pertahanan negara.

Seperti yang diketahui bahwa Yordania dan Israel merupakan negara berdekatan yang berbatasan langsung dan hanya dipisahkan oleh Sungai Yordania. Daerah Baqura dan Ghumar merupakan bagian dari kedaulatan Yordania dan berbatasan langsung dengan Israel.

Keamanan dan pertahanan untuk melindungi warga negara merupakan perhatian utama suatu negara, begitupun Yordania. Melihat wilayahnya yang berbatasan langsung dengan Israel menjadikan penting bagi Yordani menjaga serta melindungi kedaulatannya. Kekhawatiran warga Yordania semakin

meningkat karena adanya penembakan warga negara Yordania oleh polisi keamanan Israel di Amman pada 2017 lalu juga, memunculkan skeptis Yordania terhadap Israel yang dapat mengancam keamanan warga negaranya (Hasan, 2018).

C. Konteks Internasional

Pada perjanjian damai 1994, Israel mengakui peran Yordania menjaga situs-situs suci di Yerusalem dan posisi ini dipertegas dengan adanya perjanjian antara Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan Raja Yordania Abdullah II menegaskan kembali peran bersejarah Yordania sebagai pemelihara situs-situs suci di Yerusalem (Prusher, 2013).

Isu yang menimpa Yerusalem tentu saja menjadi pembahasan penting bagi negara-negara arab melihat Yerusalem sebagai tempat untuk berbagai peninggalan situs-situs islamiah yang penting bagi kaum muslimin. Adanya ketegangan di Yerusalem tidak hanya mempengaruhi hubungan Yordania-Israel, tetapi juga dapat mempengaruhi hubungan

antara negara-negara arab lain dengan Yordania. Dimana pengakuan AS akan mendorong negara Arab yang notabeneanya telah menjalin hubungan dekat dengan AS untuk mengambil peran penting di Yerusalem.

HASIL ANALISIS

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, terdapat 3 alasan atau faktor yang melatarbelakangi Yordania memutuskan perjanjian damai dengan Israel.

A. Pengakuan Sepihak Israel terhadap Kepemilikan Yerusalem

Yerusalem adalah sebuah kota yang terletak melintasi perbatasan antara Israel dan *West Bank* atau Tepi Barat. Kota ini merupakan rumah berbagai situs-situs suci bagi umat islam maupun yahudi, seperti masjid Al-Aqsa dan *Dome of Rock* (Beauchamp, 2018). Kota Yerusalem telah menjadi salah satu isu paling sulit dalam konflik Israel-Palestina. Yerusalem telah mengalami kontroversi mengenai permukiman, kekerasan, dan perubahan demografis. Konflik ini berfokus pada area

Kota Tua atau *Old City* di Yerusalem, telah melibatkan berbagai aktor seperti Israel, negara-negara Arab atau aktor internasional lainnya. Isu di Yerusalem dapat dikatakan sebagai faktor konteks internasional melihat peran besar Yordania sebagai penjaga situs-situs suci di wilayah status quo Kota Tua Yerusalem serta pengaruh dari konflik tersebut pada Yordania.

Pada 1967, Israel mengatakan bahwa Yerusalem adalah kesatuan yang berdaulat. Hal ini menyebabkan perpecahan perang Arab II yang berujung pada Israel dan berhasil menganeksasi Yerusalem Timur termasuk area Kota Tua. Tindakan pencaplokan ini menuai penolakan keras oleh masyarakat internasional karena dianggap Israel telah melanggar Resolusi PBB serta hukum internasional yang ada (Cattan, 1981).

Perjanjian terkait status quo Yerusalem termasuk penetapan peran khusus Yordania merupakan langkah penting dalam mencegah adanya

konfrontasi antara Israel maupun negara-negara Arab dan masyarakat muslim (Shoval, 2019).

Tindakan aneksasi yang dilakukan Israel dianggap menciptakan situasi yang eksploif dan dapat mengancam perdamaian dan keamanan dunia. Akibatnya, Israel diberi status sebagai penjajah militer dan pencaplokan ini tidak diakui oleh dunia internasional. Negara-negara Arab bersih keras mengatakan penolakan terhadap tindakan Israel dan menolak memberikan pengakuan atas pencaplokan yang dilakukan Israel. Yerusalem pun hingga saat ini menjadi area yang belum jelas kepemilikannya serta penuh dengan konflik dan ketegangan (Albasoos, 2013)

Pada 2017 lalu, pernyataan mengejutkan dari Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel dan rencana Trump untuk memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem. Tindakan AS dianggap kontroversial dan mendapat

berbagai reaksi dari dunia internasional (Landler, 2017). Seperti yang diketahui bahwa Yordania adalah penjaga sah situs-situs suci di Yerusalem sesuai perjanjian damai tahun 1994. Adanya pengakuan AS ini membuka bab baru dalam hal kompetisi untuk menjadi penjaga dari situs-situs suci di kota tersebut. Banyak negara berlomba-lomba memperluas pengaruhnya di Yerusalem guna mendapatkan hak istimewa tersebut, seperti Arab Saudi, Turki dan Maroko.

Berdasarkan proposal AS mengatakan berencana menawarkan Abu Dis dari pada Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina. Namun Kota Tua dan Lembah Yordania tetap akan berada dibawah kendali Israel sepenuhnya, dan Palestina akan di demiliterisasi (tanpa tentara dan senjata berat). Jika ini menjadi tawaran terakhir, hal ini dapat menjadi kelemahan Palestina dan penyokong terbaik negara nantinya adalah mendandalkan perekonomian (Harel, 2018).

Melihat berbagai bantuan dan pendanaan, Arab Saudi dan Negara-negara Teluk memiliki kesempatan yang baik dan peluang besar untuk mengelola daerah bukit suci. Ini akan menjadi ancaman bagi status Raja Abdullah II sebagai penjaga situs-situs suci tersebut, sedangkan status tersebut juga merupakan salah satu pilar legitimasi pemerintahannya di dalam negeri. Oleh karena itu, Raja Abdullah harus mengambil tindakan untuk meyakinkan Palestina dan mempertahankan peran khususnya di daerah Yerusalem tersebut.

B. Kapabilitas Ekonomi dan Militer

1. Kekhawatiran Yordania terhadap Ankesasi Israel di Area Perbatasan

Keinginan Israel dan pengakuan AS terhadap kepemilikan Yerusalem memberikan dampak besar pada kekhawatiran keamanan baik warga Palestina, Yordania dan warga Internasional. Pernyataan ini tentu saja telah melanggar isi dari perjanjian damai.

Hal ini diperburuk dengan adanya pernyataan dari Perdana Menteri Netanyahu tentang rencana Israel menganekasasi daerah Lembah Yordania. Pernyataan tersebut mengundang kritik besar dari PBB dan negara-negara arab khususnya Yordania.

Lembah Yordania merupakan sebidang tanah subur yang membentang di sekitar perbatasan Yordania dan 30% terdiri dari Tepi Barat. Daerah ini menjadi rumah bagi sekitar 65.000 warga Palestina dan 11.000 pemukim Yahudi. Dengan demikian, itu adalah cadangan tanah terbesar yang dimiliki Palestina untuk pengembangan negara merdeka di masa depan. Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi, menyebut rencana ini sebagai suatu ancaman eskalasi yang serius dan dapat mendorong adanya kekerasan diseluruh kawasan (BBC, 2019).

Kebuntuan perdamaian antara Israel-Palestina serta Israel yang terus mengendalikan Tepi Barat juga dapat dianggap sebagai suatu ancaman strategi

substantif bagi Yordania. Dimana saat status quo Yerusalem terus berlanjut namun tidak ada kemajuan tentang pencapaian pembentukan negara Palestina, Warga Yordania khawatir tentang pengusiran orang-orang Palestina dari Tepi Barat ke Yordania. Dengan pembengkakan pengungsi Palestina yang masuk, Pangeran Hassan (Paman Raja Abdullah II) menyebutkan bahwa hal ini akan menyebabkan kemungkinan darurat “agresi demografis” yang dapat menimbulkan permasalahan dalam negeri (Sher & Ben-Kalifa, 2018).

Dalam perjanjian damai, Yordania sepakat meminjamkan dua tanahnya yaitu Ghumar dan Baquora. Namun selama beberapa tahun terakhir, Jordan telah mengungkapkan kemarahan dan frustrasi atas berlanjutnya provokasi Israel ditambah dengan pernyataan Netanyahu, menyebabkan kekhawatiran berat untuk Yordania terkait dengan kedulatan kedua area tersebut (Sharif, 2019).

Apalagi beredar seruan dari kalangan keamanan, politik dan penelitian Israel mendesak para pengambil keputusan di Israel untuk lebih memperhatikan Yordania dan negaranya yang melemah, serta masalah-masalah internal yang meningkat yang dihadapi, baik karena kebuntuan politik antara Palestina-Israel, pelanggaran Israel yang berlanjut terhadap Al-Aqsa, atau masalah-masalah pengungsi Suriah dan Irak (Middle East Monitor, 2019). Adanya dukungan AS akan membuat Israel bebas untuk mencaplok tanah-tanah yang di inginkannya termasuk daerah Baquora dan Ghumar. Oleh karena itu, warga Yordania khawatir krisis ekonomi ditengah peningkatan pengungsi yang masuk menyebabkan kemampuan militer menjadi melemah terutama dibagian perbatasan Yordania yang hingga saat ini masih menjadi isu utama. (Sher & Ben-Kalifa, 2018).

Berbagai pelanggaran dan tindakan berulang Israel ini menyebabkan tuntutan kekhawatiran dari Yordania. Langkah-

langkah Israel beberapa tahun belakang yang terkesan sangat provokatif membuat Raja Abdullah tidak punya pilihan lain selain membatalkan perjanjian damai (Sweis & Kershner, 2019).

2. Kerugian Yordania Pasca Kerjasama dengan Israel yang Diperburuk oleh Isu Yerusalem

Saat penandatanganan perjanjian damai 1994, Yordania memiliki harapan besar bahwa perjanjian tersebut akan membawa perbaikan pada situasi ekonomi dan standar hidup di Yordania. Namun ternyata manfaat perdamaian ini tidak begitu banyak. Banyak dari bagian tentang kerja sama ekonomi dan sipil yang termasuk dalam perjanjian damai Israel-Yordania dan lampirannya (serta sekitar 15 perjanjian lainnya yang ditandatangani pada 1995-1997) belum, atau hanya sebagian yang dilaksanakan. Rencana bersama yang lebih besar dan lebih

ambisius tidak memiliki dukungan kemampuan ekonomi atau lingkungan, dan bahwa Israel juga selalu terlihat tidak memiliki niat nyata untuk menerapkannya.

Ada berbagai faktor yang menyebabkan semakin buruknya perekonomian Yordania. Sejak 2010-2011 pasca *Arab Spring*, kondisi ekonomi di Yordania menjadi buruk secara signifikan, terutama karena alasan ledakan pengungsi yang masuk (diperkirakan sekitar 9-18% dari populasi penduduknya dan menghabiskan biaya yang diperkirakan Bank Dunia sekitar \$2,5 miliar pertahun. Utang negara pun pada 2019 telah mencapai 96% dari GDP Yordania (menjadikannya utang publik terbesar kedua di kawasan itu setelah Lebanon). Hal ini diperburuk dengan pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai 2%, tingkat pengangguran yang tinggi dan eksport-import pada 2014-2016 berada pada tingkat yang sama dengan 2010 (Krasna, 2019).

Selama kerjasama ekspor-impor dengan Israel, jumlah hasil dari komoditas barang antara Yordania dan Israel juga tidak terlalu tinggi, namun terdapat perbandingan cukup besar pada jumlah komoditasnya. Pada 2007, ekspor Israel ke Yordania berjumlah sekitar \$250 juta dan meningkat menjadi sekitar \$288 juta pada tahun 2008. Pada 2007 ekspor Yordania ke Israel berjumlah sekitar \$54 juta dan menjadi \$105 juta pada 2008 (Mitha, 2009).

Hingga tahun 2018 lalu ekspor Yordania ke Israel mencapai \$14ribu dan impor mencapai \$515 ribu. Sedangkan Ekspor Israel ke Yordania tahun 2018 mencapai \$44 ribu dan impor dari Yordania mencapai \$30 ribu (UN Commodity Trade, 2018). Berdasarkan data ini dapat dilihat bahwa terjadi penurunan signifikan dari jumlah ekspor impor Yordania-Israel. Selain itu perputaran barang Israel yang masuk ke Yordania lebih banyak, sedangkan barang

Yordania yang masuk ke Israel lebih sedikit.

Yordania digunakan sebagai gerbang bagi perusahaan Israel untuk mengirimkan produk-produknya ke negara yang tidak berhubungan dengannya Arab dan kerjasama antar Yordania dan Israel selalu bersifat rahasia dikarenakan ada banyak penolakan dari gerakan anti-normalisasi di Yordania.

Sedangkan barang ekspor Yordania ke Israel selalu menghadapi masalah seperti masalah transportasi barang yang terkesan tidak efektif. Barang-barang Yordania yang mencapai perbatasan Israel harus diturunkan dan diperiksa dengan alasan keamanan serta sample barang ekspor Yordania yang harus di uji di lab Israel terlebih dahulu membuat Yordania mengeluh bahwa sistem tersebut membatasi aliran barang, meningkatkan biaya dan menyebabkan penundaan yang signifikan. Kesulitan dalam memasukkan produk Yordania ke Israel ini terkesan menghalangi produk Yordania untuk

masuk dan membuat Yordania merasa dirugikan karena banyaknya aturan yang harus dipenuhi menghambat pergerakan barang (Mitha, 2009). Meskipun ada beberapa perjanjian perdagangan antara kedua negara, hasil perdagangan tidak menjanjikan dan berada di bawah kendali prosedur dan peraturan Israel.

Yordania yang tidak mendapatkan manfaat signifikan. Bahkan hingga 2018 GDP Yordania yang tidak stabil menurun hingga 2%, sedangkan pengangguran melonjak hingga 18,5% dan peningkatan ekspor hampir terhenti (Gal, 2018).

Perekonomian di Yordania semakin terpuruk sejak AS menyatakan mengurangi dana bantuannya untuk pengungsi pada 2018 lalu. Menurut mantan pejabat R. David Harden, yang bekerja di Badan Pengembangan Internasional Amerika Serikat hingga April, tindakan ini sebagai bagian dari rencana untuk memaksa para politisi Palestina untuk membatalkan tuntutan bagi banyak dari para pengungsi untuk kembali

ke daerah milik Israel yang mereka sebut tanah air mereka (Wong, 2018).

Sebagai salah satu penerima pengungsi terbesar, Yordania tidak hanya kedatangan pengungsi dari Palestina melainkan juga dari Syria dan Iraq. Klaim Israel terhadap Yerusalem ini akan berdampak besar pada Yordania yang pada dasarnya telah mengalami kesulitan karena pembengkakan pengungsi setiap tahunnya.

Menurut Ben Fishman, Mantan Dewan Keamanan Nasional AS, semakin banyak pengungsi di Yordania akan menyebabkan banyak tekanan sosial ketika para pengungsi yang diberi hak sama dengan warga negara mengambil pekerjaan maupun memanfaatkan layanan yang ada. Ekonomi tidak dapat berfungsi di tingkat ideal serta dan penciptaan lapangan kerja yang sudah sangat terbatas menjadi lebih kompetitif untuk warga negara. Ditambah kebutuhan akibat populasi yang meningkat semakin banyak sedangkan sumber daya Yordania terbatas.

Kebijakan AS menurunkan jumlah bantuannya membawa dampak besar pada Yordania. Selain sebagai salah satu negara penampung pengungsi terbesar, dana bantuan asing juga merupakan salah satu sumber dana yang menyokong perekonomian Yordania selama ini. Oleh karena itu, perekonomian Yordania menjadi terancam karena akan kekurangan suntikan dana sedangkan kebutuhan untuk pengungsi terus meningkat. (Krasna, 2019).

Perjanjian damai terkesan tidak membawa banyak keuntungan bagi Yordania. Hal ini pun mendorong Yordania untuk membatalkan perjanjian damai dengan Israel. Melihat dari ketegangan, masalah keamanan serta krisis ekonomi diatas. Isu di Yerusalem memiliki dampak pada keamanan wilayah Yordania khususnya di perbatasan maupun keamanan regional. Selain itu, arus pengungsi dan krisis ekonomi di Yordania yang tidak kunjung membaik, bahkan memburuk sejak pemutusan dana bantuan

AS mendorong Yordania untuk mengakhiri perjanjian damai dengan Israel

C. Tekanan dari Parlemen dan Masyarakat Yordania

Dalam kasus Pemutusan Perjanjian Perdamaian Yordania-Israel 1994, kebijakan ini dipengaruhi paling signifikan oleh dua aktor domestik adalah yang pertama, *Beraucratic Influencer* dimana adalah Parlemen yang membantu pengambil keputusan pemimpin namun selalu mengedepankan kepentingan negara dan rakyatnya. Yang kedua adalah Interest Influencer yang merupakan gabungan dari berbagai kalangan masyarakat dalam suatu negara yang berganbung karena adanya tujuan yang sama untuk mempengaruhi pemimpin dalam membuat kebijakannya.

Perubahan-perubahan eksternal di sekitar Yordania dapat mempengaruhi stabilitas negara tersebut serta juga dapat berdampak negatif bagi keamanannya. Seperti pada ketakutan warga Yordania terhadap pencaplokan yang dilakukan oleh

Israel dapat membahayakan stabilitas dalam negeri Yordania (Amer D. A., 2019).

Di Yordania, di mana lebih dari setengah populasi diyakini sebagai pengungsi Palestina atau keturunan mereka, opini publik sebagian besar tetap menentang hubungan normal dengan Israel. Dengan banyak warga Yordania menjadi keturunan Palestina, Yordania menjadi lebih waspada terhadap kerusuhan yang mungkin timbul secara internal jika protes terhadap tindakan Israel menjadi kekerasan atau menyerang pemerintah (Amour, 2019).

Munculnya gerakan “Anti-Normalisasi” di Yordania juga merupakan salah satu awal adanya unjuk rasa besar-besaran yang sering terjadi di Yordania. Gerakan ini yang memberlakukan aturan dan regulasi untuk melarang interaksi dengan Israel. Gerakan ini telah

Ungkapan dukungan pembatalan ini juga diberikan oleh Sheikh Hamam,

menyatukan pihak-pihak dari berbagai kalangan (seperti profesi dokter, pengacara, insinyur dan sebagainya) yang secara ideologis menentang, untuk membentuk oposisi terhadap perjanjian perdamaian dengan Israel (Mitha, 2009).

Pada 2014, Jordan menarik duta besarnya dari Israel akibat ketegangan di Kota Tua Yerusalem yang memicu bentrokan berulang antara polisi Israel dan Palestina dalam beberapa pekan terakhir, yang berpuncak pada penutupan satu hari masjid Al-Aqsa. Pejabat Yordania khawatir kerusuhan yang lebih luas di Tepi Barat dapat meluas ke negara hingga ke Yordania juga. Akibat kekerasan yang terjadi di Masjid Al-Aqsa, ribuan pengunjung rasa turun ke jalan-jalan di berbagai kota di Yordania menuntut pengusiran Duta besar Israel dari Amman dan membatalkan perjanjian damai. ketua partai Ikhwanul Muslim yang ikut dalam unjuk rasa yang mengatakan

“Mengapa kamu menjaga kedutaan orang Yahudi? Itu harus dihancurkan dengan semua orang di dalamnya” (Al-Khalidi, Jordanians protest against Israel, urge end to peace treaty, 2014).

Seperti yang diketahui sebelumnya, krisis ekonomi di Yordania yang berkepanjangan dan malah memburuk akibat kekurangannya bantuan luar negeri sebagai salah satu penyokong utama perekonomiannya, menyebabkan pemerintah harus mencari cara lain untuk

Selain dari masyarakat, dukungan pembatalan perjanjian damai juga berasal dari Parlemen Yordania. Dikatakan bahwa Parlemen Yordania memiliki berbagai catatan pelanggaran yang dilakukan Israel. Pada 2017 lalu, Anggota parlemen Yordania berkumpul untuk menandatangani memo parlemen yang menuntut pemerintahan Raja Abdullah II untuk mengusir duta besar Israel, menutup

mempertahankan perekonomiannya. Pemerintah pun mengeluarkan kebijakan dengan menaikkan pajak. Namun kebijakan ini menuai kritik besar-besaran oleh warganya (Al Jazeera, 2018).

Pernyataan pemerintah yang juga menyetujui kenaikan tajam harga bahan bakar rata-rata 5%, menyebabkan protes pecah. Ribuan warga Yordania melakukan aksi protes terhadap kenaikan tagihan pajak penghasilan yang kontroversial. Masyarakat Yordania pun melakukan aksi protes dan kritik terhadap peluang lapangan kerja yang sangat kecil (Sharif, 2018).

kedutaan dan memanggil duta besar Yordania dari Tel Aviv, pasca Isu Yerusalem dan pembunuhan dua warga negara Yordania pekan lalu oleh seorang penjaga keamanan Israel. Jumlah penandatanganan nota terakhir mencapai 75 deputi dari 130 anggota Parlemen Yordania. Memo ini berfungsi untuk sebagai alat pemantauan terhadap keputusan pemerintah agar dapat dirujuk

dan secara tidak angung menjadikan dorongan terhadap keputusan yang mau di ambil. Walaupun dalam monarkinya keputusan terbesar tetap kepada Raja Abdullah II (Al Qaha News, 2017).

Perjanjian yang dilakukan dengan Israel menyebabkan pemerintah mengalami tekanan politik yang meluas akibat adanya dukungan kuat aktivis serta para politisi terhadap Yordania. Banyak dari mereka yang menyuarakan bahwa keputusan pemerintah melakukan kerjasama selama ini merupakan tindakan yang memalukan negara yang sama saja dengan melegalkan pendudukan Israel di Yordania (Djafar, 2018).

Kegagalannya menanggapi tuntutan rakyat dan memo parlemen akan membahayakan tidak hanya pemerintah melainkan juga tahta Raja Abdullah II ditengah tren arab spring di kawasan timur tengah (Sharif, King Abdullah's move to terminate parts of peace treaty seen as snub to Netanyahu, 2018).

Euforia tentang kekhawatiran itu Yerusalem dan pencaplokan Israel saat ini akan meningkatkan persatuan nasional dan mengalihkan perhatian masyarakat. Oleh karena itu, Raja Abdullah perlu melakukan langkah-langkah penting yaitu membatalkan perjanjian dengan Israel untuk mengambil hati warganya dan mempertahankan posisi serta stabilitas politik dalam negeri.

Tekanan untuk memutus perjanjian dengan Israel oleh masyarakat Yordania serta para parlemen mendorong Raja Abdullah II untuk mengeluarkan keputusan pembatalan perjanjian tersebut. Dengan ini, berdasarkan teori politik luar negeri, masalah politik domestik dapat menjadi salah satu faktor pemutusan perjanjian damai Yordania-Israel.

KESIMPULAN

Israel sejak dahulu memang terkenal memiliki hubungan yang konfliktuan dengan negara-negara Arab, hubungan yang konfliktual ini pada awalnya hanya berisikan perang atau

pertentangan. Salah satu negara Arab yang sering berkonflik dengan Israel adalah Yordania.

Latar belakang sejarah yang penuh dengan konflik ini ternyata tidak menutup kemungkinan adanya kerjasama diantara kedua negara. Dimana pada tahun 1994, Yordania diwakili Raja Hussein bersepakat dengan Israel yang diwakili oleh Perdana Menteri Netanyahu untuk menandatangani sebuah Perjanjian Damai. Perjanjian ini pun di dukung dan dimediasi oleh Amerika Serikat yaitu Presiden Bill Clinton selaku sekutu Israel.

Kerjasama pun mulai terjalin diawali pada tahun 1996 yaitu dengan program Qualification Industrial Zone yang merupakan program pasar bebas untuk akses keluar masuk barang dagang antara Yordania-Israel-AS. Sejak itu kerjasama antar kedua semakin meluas diberbagai bidang seperti infrastruktur, pertanian, pendidikan, lingkungan dan sebagainya. Hingga pada 2018, dua dekade pasca penandatanganan perjanjian,

Yordania melalui Raja Abdullah II mengumumkan rencananya yaitu tidak melanjutkan lagi Perjanjian Damai dengan Israel yang sudah terjalin hingga dua dekade lebih.

Sesuai dengan teori Coplin tentang Foreign Decision Making Process terdapat 3 faktor saling berhubungan yang mempengaruhi Yordania melakukan pemutusan perjanjian tersebut. Diantaranya adalah alasan konteks internasional, kapabilitas militer dan ekonomi, serta politik domestik.

Yang pertama adalah Isu yang terjadi di Yerussalem. Yerussalem yang saat ini berstatus quo terdapat berbagai peninggalan situs-situs suci bagi umat Islam dan Yahudi yang menjadi salah satu alasan konflik Israel Palestina. Pernyataan Perdana Menteri Israel Netanyahu yang berencana melakukan pencaplokan kepada keseluruhan Yerussalem ditambah dengan pengakuan AS terhadap Yerussalem sebagai Ibu kota Israel menuai banyak protes dari dunia Internasional. Israel

dianggap telah melanggar hukum Internasional dan juga tidak menghargai peran Yordania di wilayah tersebut sesuai dengan isi perjanjian tahun 1994.

Perencanaan AS tentang kepemilikan penuh Yerusalem oleh Israel ini menyebabkan banyak negara berlomba-lomba memperluas pengaruhnya di Yerusalem guna mendapatkan hak istimewa tersebut, seperti Arab Saudi, Turki dan Maroko.

Adanya kompetisi dengan negara-negara yang cenderung dominan di kawasan timur tengah ini akan menjadi ancaman bagi status Yordania sebagai penjaga di Yerusalem, dimana peran ini juga menjadi salah satu agenda politik domestik dan juga untuk memperkokoh posisi Yordania di kawasan. Oleh karena itu, Yordania harus mencoba menentang keputusan Israel ini dan salah satu senjatanya adalah dengan memutuskan perjanjian damai.

Alasan kedua yang menyebabkan pemutusan perjanjian tersebut adalah masalah keamanan dan juga ekonomi.

Keinginan Israel mencaplok seluruh Yerusalem dan Lembah Yordania juga memunculkan kekhawatiran Yordania akan adanya ledakan pengungsi dari Yordania. Sedangkan pengungsi Palestina di Yordania saat ini telah mencapai 2 juta lebih jiwa. Masalah pengungsi ini akan menyebabkan banyak gangguan terhadap stabilitas dalam negeri baik sosial, keamanan maupun ekonomi. Dengan banyaknya pengungsi yang masuk, otomatis akan meningkatkan kebutuhan baik makanan, kesehatan maupun pendidikan di dalam negeri. Sedangkan Yordania yang masih dilanda krisis ekonomi dan berkurangnya suntikan dana dari UN akan sulit untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut.

Ditambah dengan kerjasama dengan Israel selama beberapa dekade ini tidak membawa perubahan signifikan terhadap perekonomian Yordania. Oleh

karena itu melihat permasalahan ekonomi di Yordania yang tidak kunjung membaik dan berbagai masalah regional, Perjanjian damai terkesan tidak membawa banyak keuntungan bagi Yordania. Hal ini pun mendorong Yordania untuk membatalkan perjanjian damai dengan Israel.

Yang terakhir adalah politik domestik. Banyaknya warga Yordania keturunan Palestina membuat Yordania memiliki keterikatan yang kuat terhadap konflik Israel-Palestina. Ditambah dengan warga dan para politisi yang mayoritas memberikan dukungannya terhadap Palestina.

Tuntutan pemutusan yang pertama berasal dari Parlemen Yordania. Dimana Parlemen mendesak Raja Abdullah II untuk membatalkan perjanjian damai dengan Israel melihat banyak sekali pelanggaran yang telah dilakukan oleh Israel sejak perjanjian damai tahun 1994. Tekanan dari masyarakat Yordania bisa dilihat pada tahun 2014 dimana ribuan warga turun ke jalan menuntut pemerintah

membatalkan perjanjian damai dengan Israel pasca kekerasan yang terjadi di Yerusalem. Sedangkan pada 2017 warga juga kembali melakukan aksi protes.

Selain karena masalah di Yerusalem yang semakin berbahaya, aksi protes yang dilakukan ini juga dapat berdampak kepada pemerintah itu sendiri, yaitu posisi Raja Abdullah II ditengah tren aram spring yang sedang melanda timur tengah. Raja Abdulla II harus berusaha mengambil kembali kepercayaan rakyatnya yaitu dengan mendengarkan tuntutan mereka. Oleh karena itu, Raja Abdullah II mengambil tindakan dengan memutuskan perjanjian damai tahun 1994 dengan Israel.

Dari berbagai alasan diatas dapat dilihat berbagai pelanggaran dari pasal-pasal perjanjian yang dilakukan oleh Israel. Diantaranya tidak menghormati peran Yordania dan tidak menghargai status quo dari area Yerusalem dengan melakukan berbagai tindakan militer yang menghambat akses masyarakat pada Area

tersebut. Melanggar perjanjian mengenai perbatasan dengan melakukan pencaplokan yang tidak sesuai dengan batas wilayah yang telah diatur oleh PBB. Selain itu kerjasama yang dilakukan keduanya sesuai perjanjian damai tidak berjalan secara maksimal hingga saat ini.

Berbagai pelanggaran yang dilakukan Israel menyebabkan berbagai kerugian yang dialami oleh Yordania seperti yang telah disebutkan diatas.

Sedangkan ekspektasi awal Yordania untuk menjalin kerjasama dengan Israel adalah mengurangi ancaman dari negara tersebut dan meningkatkan manfaat baik ekonomi maupun keamanan disekitar wilayahnya. Hal inilah yang membuat Yordania akhirnya mengambil tindakan untuk menghentikan perjanjian damai dengan melihat tindakan Israel yang tidak beritikad baik mengikuti peraturan-peraturan sesuai isi perjanjian tersebut.

Daftar Pustaka

- Al Jazeera. (2018, December 14). *Jordan: Anti-tax protests resume as new government seeks dialogue*. Retrieved December 13, 2019, from Al Jazeera:
<https://www.aljazeera.com/news/2018/12/jordan-anti-tax-protests-resume-government-seeks-dialogue-181214071233264.html>
- Al Qaha News. (2017, July 13). "الاحتجاجات في الأردن.. 70 شخصاً قتلوا". "الاحتجاجات في الأردن.. 70 شخصاً قتلوا" في الأردن. Retrieved December 13, 2019, from Al Qaha News: <http://www.alqalahnews.net/more-162980-36-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8..-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-70-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%8A-%D8%A8%D8>
- Albasoos, H. (2013). Sovereignty over Jerusalem. *JOURNAL OF CONFLICTOLOGY*, Volume 4, Issue 2, 6.
- Al-Khalidi, S. (2014, November 07). *Jordanians protest against Israel, urge end to peace treaty*. Retrieved December 13, 2019, from Reuters:
<https://www.reuters.com/article/us-mideast-palestinians-jordan/jordanians-protest-against-israel-urge-end-to-peace-treaty-idUSKBN0IR1MB20141107>
- Amer, D. A. (2019, October 29). *Jordan, Israel mark anniversary of peace treaty amid weak relations*. Retrieved December 13, 2019, from MEMO:
<https://www.middleeastmonitor.com/20191029-jordan-israel-mark-anniversary-of-peace-treaty-amid-weak-relations/>

- Amour, O. (2019, November 11). *Jordan retakes lands leased by Israel in 1994 peace accord*. Retrieved December 12, 2019, from AP:
<https://apnews.com/c3756737fbd64a2b881caf05a4681953>
- BBC. (2019, September 11). *Arab nations condemn Netanyahu's Jordan Valley annexation plan*. Retrieved December 06, 2019, from BBC: <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-49657915>
- Beauchamp, Z. (2018, May 14). *What is Jerusalem?* Retrieved November 30, 2019, from Vox.com: <https://www.vox.com/2018/11/20/18080040/jerusalem-israel-palestine>
- Cattan, H. (1981). The Status of Jerusalem under International Law and United Nations Resolutions. *Journal of Palestine Studies Vol. 10, No. 3* .
- Coplin, W. D. (1992). *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis*. Bandung: CV. Sinar Baru.
- Djafar, A. (2018, October 21). *Yordania Menolak Perpanjangan Perjanjian Damai atas Tanah yang dikuasai Israel*. Retrieved December 13, 2019, from Gatra:
<https://www.gatra.com/detail/news/357444-Yordania-Menolak-Perpanjangan-Perjanjian-Damai-atas-Tanah-yang-Dikuasai-Israel>
- Fanack. (2009, September 16). *Governance & Politics*. Retrieved October 12, 2019, from fanack.com: <https://fanack.com/jordan/governance-and-politics-of-jordan/>
- Gal, Y. (2018, October 17). *Israeli-Jordanian Trade: In-Depth Analysis*. Retrieved October 09, 2019, from Tony Blair Institute for Global Change:
<https://institute.global/insight/middle-east/israeli-jordanian-trade-depth-analysis>
- Haberman, C. (1994, October 27). *THE JORDAN-ISRAEL ACCORD: THE OVERVIEW; ISRAEL AND JORDAN SIGN A PEACE ACCORD*. Retrieved August 20, 2019, from nytimes.com:

<https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/learning/general/onthisday/big/1026.html>

- Harel, A. (2018, June 22). *Why Jordan Is Worried About Trump's Peace Plan*. Retrieved December 01, 2019, from Haaretz: <https://www.haaretz.com/middle-east-news/jordan/.premium-why-jordan-is-worried-about-trump-s-peace-plan-1.6198909>
- Hasan, R. A. (2018, April 16). *Dubes Israel untuk Yordania Kembali Bertugas, Akhiri Krisis Diplomati Kedua Negara*. Retrieved June 18, 2019, from Liputan6: <https://www.liputan6.com/global/read/3460298/dubes-israel-untuk-yordania-kembali-bertugas-akhiri-krisis-diplomatik-kedua-negara>
- Krasna, D. J. (2019, June 20). *The Jordan-Israel Peace Treaty at 25: A Slightly Tarnished, but Still Important, Silver Anniversary*. Retrieved December 06, 2019, from The Jerusalem Institute for Strategy and Security: <https://jiss.org.il/en/krasna-the-jordan-israel-peace-treaty-at-25/>
- Landler, M. (2017, December 06). *Trump Recognizes Jerusalem as Israel's Capital and Orders U.S. Embassy to Move*. Retrieved November 01, 2019, from The New York Times: <https://www.nytimes.com/2017/12/06/world/middleeast/trump-jerusalem-israel-capital.html>
- Middle East Monitor. (2019, October 29). *Jordan, Israel mark anniversary of peace treaty amid weak relations*. Retrieved December 14, 2019, from middleeastmonitor.com: <https://www.middleeastmonitor.com/20191029-jordan-israel-mark-anniversary-of-peace-treaty-amid-weak-relations/>
- Mitha, F. (2009). *The Jordanian-Israeli Relationship: The Reality of "Cooperation"*. Retrieved December 06, 2019, from Middle East Policy Council: <https://mepc.org/jordanian-israeli-relationship-reality-cooperation>

- Nations Encyclopedia. (1997). *Jordan - Political parties*. Retrieved November 23, 2019, from nationsencyclopedia.com: <https://www.nationsencyclopedia.com/Asia-and-Oceania/Jordan-POLITICAL-PARTIES.html>
- Prusher, I. (2013, April 04). *Jordan to Safeguard Jerusalem's Islamic Holy Sites - if They're Still Standing*. Retrieved June 19, 2019, from haaretz.com: <https://www.haaretz.com/.premium-a-new-guardian-for-islamic-holy-sites-in-j-lem-1.5236867>
- Safitri, H. A. (2017). *JORDAN FOREIGN POLICY TOWARDS ISRAEL: THE SIGNATURE OF JORDAN-ISRAEL PEACE TREATY 1994*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Schenker, D. (2014, October 23). *Twenty Years of Israeli-Jordanian Peace: A Brief Assessment*. Retrieved October 12, 2019, from washingtoninstitute.org: <https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/twenty-years-of-israeli-jordanian-peace-a-brief-assessment>
- Sharif, O. A. (2018, June 05). *Jordan's days of rage force PM to resign*. Retrieved December 13, 2019, from Al Monitor: <https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/06/jordan-protests-tax-hikes-prime-minister-government.html#ixzz68J3TfXYL>
- Sharif, O. A. (2018, October 26). *King Abdullah's move to terminate parts of peace treaty seen as snub to Netanyahu*. Retrieved December 13, 2019, from Al Monitor: <https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/10/jordan-king-terminate-israel-peace-treaty-annexes-lands.html#ixzz68J4Bpz5b>
- Sharif, O. A. (2019, November 14). *Jordan's cold peace with Israel holds for now*. Retrieved December 13, 2019, from Gulf News: <https://gulfnews.com/opinion/op-eds/jordans-cold-peace-with-israel-holds-for-now-1.67800021>

Sher, G., & Ben-Kalifa, M. (2018, October 29). *Challenge to the Israel-Jordan Peace Treaty*.

Retrieved December 13, 2019, from inss.org.il:

<https://www.inss.org.il/publication/challenge-israel-jordan-peace-treaty/>

Shoval, Z. (2019, November 12). *Israel-Jordan peace needs warming up*. Retrieved

December 01, 2019, from The Jerusalem Post: [https://www.jpost.com/Opinion/Israel-](https://www.jpost.com/Opinion/Israel-Jordan-peace-needs-warming-up-607233)

[Jordan-peace-needs-warming-up-607233](https://www.jpost.com/Opinion/Israel-Jordan-peace-needs-warming-up-607233)

Sweis, R. F., & Kershner, I. (2019, November 10). *Jordan Reclaims Land Israelis Used*

Under '94 Peace Accord. Retrieved December 11, 2019, from The New York Times:

<https://www.nytimes.com/2019/11/10/world/middleeast/jordan-israel-lease-land.html>

UN Commodity Trade. (2018). *Import : Jordan*. Jordan: United Nation.

Wong, E. (2018, August 31). *U.S. to End Funding to U.N. Agency That Helps Palestinian*

Refugees. Retrieved December 06, 2019, from The New York Times:

<https://www.nytimes.com/2018/08/31/us/politics/trump-unrwa-palestinians.html>